

PAPER

BAPPENAS DAN ORGANISASI INTERNASIONAL:

HUBUNGAN STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL

Marcha Listiani Effendy

2316041109

ABSTRAK

Paper ini membahas hubungan antara Kementerian PPN/Bappenas dengan berbagai organisasi internasional dalam konteks pembangunan nasional dan globalisasi. Bappenas bukan hanya lembaga perencana domestik, tetapi juga menjadi jembatan antara kebijakan nasional Indonesia dengan standar dan agenda pembangunan global yang dibawa oleh *PBB*, *World Bank*, *ADB*, dan forum-forum multilateral. Melalui pengamatan selama magang MBKM di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, paper ini berargumen bahwa perencanaan pembangunan nasional sangat dipengaruhi oleh dinamika internasional, sekaligus harus mampu menjaga relevansinya terhadap kebutuhan masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Bappenas, Organisasi Internasional, *SDGs*, Perencanaan Pembangunan, Globalisasi

PENDAHULUAN

Di era globalisasi, tidak ada lembaga pemerintah yang bisa bekerja sendirian tanpa memperhatikan perkembangan di tingkat internasional. Kementerian PPN/Bappenas, sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas perencanaan pembangunan nasional Indonesia, menghadapi kenyataan ini setiap hari. Komitmen Indonesia di berbagai forum internasional mulai dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* hingga perjanjian iklim *Paris* semuanya harus diterjemahkan ke dalam dokumen perencanaan nasional yang menjadi tanggung jawab Bappenas.

Pengalaman magang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Bappenas membuka pandangan bahwa hubungan antara institusi perencanaan nasional dengan organisasi internasional jauh lebih dalam dari sekadar menerima dana atau mengikuti sidang internasional. Ada proses pertukaran pengetahuan, adopsi standar, hingga negosiasi

kepentingan yang terjadi secara terus-menerus. Paper ini mencoba menguraikan hubungan tersebut secara kritis dan sistematis.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah: bagaimana hubungan antara Bappenas khususnya Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana dengan organisasi-organisasi internasional, dan apa dampaknya bagi perencanaan pembangunan Indonesia? Jawaban atas pertanyaan ini penting dan tidak hanya secara akademis, tetapi juga untuk memahami bagaimana Indonesia memposisikan dirinya di tengah sistem pembangunan global.

PROFIL BAPPENAS DAN POSISINYA DALAM TATA KELOLA GLOBAL

Kementerian PPN/Bappenas memiliki peran yang unik sebagai kementerian, ia menetapkan arah kebijakan perencanaan, sebagai Bappenas, ia mengoordinasikan dan mengawal implementasi rencana pembangunan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021, Bappenas berwenang menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

Dalam kajian tata kelola pembangunan global, lembaga seperti Bappenas sering disebut sebagai 'titik simpul' (*nodal point*), tempat bertemunya tiga arus sekaligus, yaitu mandat politik dari pemerintah, kebutuhan pembangunan masyarakat, dan tekanan normatif dari dunia internasional (Stone, 2019). Posisi ini membuat Bappenas tidak bisa lepas dari dinamika organisasi internasional, karena hampir semua komitmen internasional Indonesia pada akhirnya harus diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan yang menjadi produk utama Bappenas.

Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, tempat penulis bermagang merupakan unit yang mengelola perencanaan kinerja internal, reformasi birokrasi, dan tata kelola organisasi Bappenas. Meskipun terlihat sebagai urusan internal, unit ini bersentuhan langsung dengan standar-standar internasional terkait *good governance* dan manajemen berbasis hasil yang dipromosikan oleh *UNDP*, *OECD*, dan *World Bank*.

HUBUNGAN BAPPENAS DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Hubungan Bappenas dengan organisasi internasional berlangsung dalam berbagai bentuk dan melalui berbagai saluran. Secara umum, ada tiga jenis organisasi internasional yang paling signifikan pengaruhnya terhadap cara Bappenas bekerja: sistem PBB, lembaga

keuangan internasional, dan forum-forum multilateral seperti G20 dan *OECD*. Ketiganya tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling melengkapi dalam membentuk lanskap perencanaan pembangunan Indonesia.

Sistem PBB dan Agenda *SDGs*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui berbagai badan dan programnya, adalah mitra internasional yang paling langsung berpengaruh terhadap kerja Bappenas. Sejak PBB mengesahkan Agenda 2030 dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* pada 2015, Bappenas ditunjuk sebagai koordinator nasional untuk memastikan 17 tujuan dan 169 target *SDGs* masuk ke dalam perencanaan pembangunan Indonesia. Proses ini bukan perkara mudah. Bappenas harus menerjemahkan target-target global yang bersifat universal ke dalam konteks Indonesia yang sangat beragam dari Papua hingga Aceh, dari desa terpencil hingga kota metropolitan. Untuk itu, Bappenas bekerja sama dengan *UNDP* Indonesia dalam menyusun Metadata Indikator *SDGs* Indonesia dan mengembangkan sistem pemantauan yang dapat digunakan oleh kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah (Bappenas & UNDP, 2020).

Selain UNDP, Bappenas juga berinteraksi dengan *UNICEF* dalam perencanaan perlindungan anak, dengan *UN Women* dalam mengintegrasikan perspektif kesetaraan gender ke dalam RPJMN, dan dengan UNFPA dalam bidang kependudukan. Kerja sama dengan badan-badan PBB ini tidak selalu berbentuk proyek atau dana hibah, banyak yang berwujud pertukaran data, pendampingan teknis, dan penyusunan panduan metodologi bersama. Yang menarik adalah bahwa standar pelaporan dan indikator yang digunakan PBB perlahan-lahan menjadi bagian dari cara Bappenas sendiri mengukur keberhasilan pembangunan nasional. Ini adalah contoh nyata bagaimana norma internasional bisa 'masuk ke dalam' sistem perencanaan nasional bukan melalui paksaan, tetapi melalui proses adaptasi dan internalisasi yang bertahap (Fukuda-Parr & McNeill, 2019).

Lembaga Keuangan Internasional: *World Bank* dan ADB

World Bank dan *Asian Development Bank (ADB)* memiliki hubungan yang sangat erat dengan Bappenas, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan dukungan teknis. Namun, hubungan ini perlu dipahami lebih dari sekadar 'pemberi pinjaman dan penerima pinjaman'. Kedua lembaga ini juga memproduksi pengetahuan laporan, riset, dan analisis kebijakan yang menjadi referensi penting bagi para perencana di Bappenas.

World Bank, misalnya, secara rutin menerbitkan *Indonesia Economic Quarterly* dan berbagai laporan tematik tentang kemiskinan, pendidikan, dan infrastruktur di Indonesia. Laporan-laporan ini dibaca dan dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Selain itu, *World Bank* juga terlibat dalam program *technical assistance* yang membantu Bappenas mengembangkan metodologi perencanaan dan sistem pemantauan pembangunan (World Bank, 2023).

ADB berperan serupa dengan fokus yang lebih regional. Melalui kemitraan dengan Bappenas, ADB mendukung program-program di bidang infrastruktur, konektivitas, dan pembangunan inklusif. Dalam konteks *ASEAN*, ADB juga menjadi saluran yang menghubungkan prioritas nasional Indonesia dengan agenda integrasi kawasan.

Hubungan ini tidak lepas dari tantangan. Sebagian kalangan akademis mengkritik bahwa kondisionalitas yang melekat pada pinjaman meski sudah jauh lebih fleksibel dibanding era 1990-an tetap membawa agenda tertentu yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan konteks Indonesia (Prizzon et al., 2017). Bappenas dalam posisi ini harus pandai bernegosiasi, memanfaatkan dukungan finansial dan teknis yang ditawarkan, sambil memastikan bahwa prioritas nasional tidak tergeser begitu saja.

Forum Multilateral: G20 dan Proses Akses *OECD*

Sebagai anggota G20, Indonesia melalui Bappenas terlibat aktif dalam menetapkan agenda pembangunan global. Saat Indonesia memegang presidensi G20 pada 2022 dengan tema *'Recover Together, Recover Stronger'*, Bappenas turut berperan dalam merumuskan posisi Indonesia di *Development Working Group*, yang membahas isu-isu pembangunan inklusif, pembiayaan infrastruktur, dan ketahanan pangan. Yang kini menjadi prioritas besar adalah proses akses Indonesia ke *OECD*. Bergabung dengan *OECD* bukan sekadar citra, ini berarti Indonesia harus menyelaraskan berbagai kebijakan domestiknya dengan standar *OECD* di bidang tata kelola, investasi, statistik, dan lainnya. Bappenas menjadi salah satu aktor kunci dalam proses ini, karena banyak dari penyesuaian yang diperlukan menyentuh wilayah perencanaan dan kebijakan publik (OECD, 2022).

Proses ini mencerminkan sebuah dinamika yang penting, ketika sebuah negara berkembang ingin diakui setara oleh komunitas internasional, ia perlu menunjukkan bahwa sistem pengelolaannya memenuhi standar yang berlaku. Bappenas dalam konteks ini tidak hanya merencanakan pembangunan untuk rakyat Indonesia, tetapi juga 'mempersiapkan diri' agar Indonesia diakui sebagai mitra yang kredibel dalam forum internasional.

Implikasi bagi Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana

Secara lebih spesifik, Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana merasakan pengaruh organisasi internasional terutama dalam dua hal. Pertama, standar reformasi birokrasi yang kini dijalankan Bappenas seperti manajemen berbasis kinerja, transparansi, dan akuntabilitas adalah prinsip-prinsip yang dipromosikan oleh *UNDP* dan *OECD* dalam kerangka *good governance* mereka. Ketika Biro ini menyusun Rencana Strategis atau Laporan Kinerja, kerangka yang digunakan sudah mencerminkan pendekatan internasional.

Kedua, metodologi perencanaan yang digunakan seperti *logical framework (logframe)* dan *results based management* awalnya dikembangkan dan dipopulerkan oleh lembaga-lembaga internasional dalam konteks proyek pembangunan. Kini metodologi tersebut telah menjadi bagian dari cara kerja birokrasi Indonesia sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa pengaruh organisasi internasional tidak hanya bekerja di level kebijakan besar, tetapi juga meresap ke dalam praktik teknis di unit-unit internal pemerintahan.

ANALISIS KRITIS

Hubungan antara Bappenas dengan organisasi internasional membawa manfaat yang nyata yaitu akses ke pengetahuan global, dukungan finansial, dan pengakuan internasional. Namun, hubungan ini juga mengandung beberapa ketegangan yang perlu disikapi secara kritis. Pertama, ada masalah kontekstualisasi. Standar dan target yang ditetapkan organisasi internasional sering kali dirancang dalam konteks global yang tidak selalu cocok dengan realitas Indonesia. *SDGs*, misalnya, memiliki target yang sama untuk semua negara padahal kapasitas, kondisi geografis, dan tingkat pembangunan tiap negara sangat berbeda. Bappenas harus melakukan adaptasi yang cukup signifikan agar target-target tersebut relevan dan realistis. Kemampuan adaptasi inilah yang membedakan perencanaan yang baik dari sekadar penerapan resep internasional secara mekanis.

Kedua, ada risiko ketergantungan pada pendekatan atau paradigma yang dibawa lembaga keuangan internasional. Studi Prizzon et al. (2017) menunjukkan bahwa meskipun kondisionalitas pinjaman telah berkurang secara formal, pengaruh ideologis lembaga-lembaga seperti *World Bank* terhadap kebijakan pembangunan negara penerima masih berlangsung melalui jalur pengetahuan dan *technical assistance*. Bappenas perlu memiliki kapasitas analitis yang kuat untuk menyaring mana yang relevan dan mana yang tidak.

Ketiga, ada fenomena yang dalam literatur akademis disebut sebagai *isomorphic mimicry* ketika sebuah institusi mengadopsi bentuk dan label internasional tanpa mengubah substansinya (Andrews et al., 2017). Ketika laporan atau program diberi label *SDGs* atau *climate sensitive* hanya untuk memenuhi persyaratan pelaporan internasional tanpa perubahan nyata di lapangan, maka yang terjadi adalah adopsi kosmetik, bukan transformasi substantif. Bappenas sebagai koordinator perencanaan nasional, memegang tanggung jawab besar untuk memastikan internasionalisasi perencanaan bukan sekadar formalitas.

Di sisi lain, ada peluang besar yang bisa dimanfaatkan lebih optimal. Indonesia sebagai negara berkembang terbesar keempat di dunia dan anggota G20, memiliki posisi yang cukup kuat untuk tidak hanya menjadi penerima norma internasional, tetapi juga berkontribusi dalam membentuknya. Pengalaman Indonesia dalam pembangunan inklusif, pengelolaan keberagaman, dan pemulihan pascapandemi adalah cerita yang relevan dan bisa menjadi kontribusi nyata bagi komunitas pembangunan global. Bappenas bisa menjadi platform untuk menyuarakan perspektif Indonesia dalam forum-forum tersebut.

REFLEKSI DARI PENGALAMAN MAGANG

Magang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Bappenas memberikan pengalaman langsung yang memperkaya analisis dalam paper ini. Beberapa hal yang paling berkesan adalah bagaimana referensi terhadap standar internasional baik *SDGs*, kerangka *OECD*, maupun panduan UND yang hadir secara natural dalam percakapan dan dokumen sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa internasionalisasi perencanaan bukan sesuatu yang dipaksakan dari atas, tetapi sudah menjadi bagian dari cara berpikir para perencana di Bappenas. Selain itu, terlihat jelas bahwa pegawai Bappenas dituntut memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan global, tidak hanya kebijakan domestik. Diskusi tentang posisi Indonesia di forum G20 atau bagaimana target *SDGs* tertentu bisa diintegrasikan ke dalam program prioritas nasional adalah hal yang lumrah terjadi. Ini mencerminkan betapa pentingnya literasi internasional bagi seorang perencana pembangunan di era sekarang.

Namun, ada juga yang perlu dicermati, seringkali terdapat jarak antara komitmen internasional yang ambisius dengan kapasitas implementasi yang ada di lapangan. Bappenas berulang kali harus bernegosiasi antara idealisme norma global dengan keterbatasan anggaran, kapasitas SDM daerah, dan kompleksitas koordinasi lintas sektor.

Kemampuan untuk menjembatani kesenjangan inilah yang menjadi nilai tambah sesungguhnya dari sebuah lembaga perencana yang baik.

KESIMPULAN

Bappenas dan organisasi internasional memiliki hubungan yang erat, multidimensional, dan terus berkembang. Hubungan ini tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai 'Indonesia mengikuti arahan internasional' kenyataannya jauh lebih dinamis dari itu. Bappenas adalah aktor aktif yang harus terus bernegosiasi, mengadaptasi, dan mengintegrasikan berbagai agenda global ke dalam konteks pembangunan nasional yang unik. Dari sisi sistem PBB, hubungan ini paling terasa melalui integrasi SDGs ke dalam RPJMN dan kerja sama teknis dengan berbagai badan PBB. Dari sisi lembaga keuangan internasional, *World Bank* dan ADB berperan tidak hanya sebagai pemberi dana, tetapi juga sebagai mitra pengetahuan yang turut membentuk pendekatan perencanaan. Dari sisi forum multilateral, G20 dan proses akses *OECD* menjadi arena di mana Bappenas harus mempersiapkan Indonesia agar diakui sebagai pemain yang setara dalam komunitas pembangunan global. Yang terpenting, pengalaman magang di Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana menunjukkan bahwa pengaruh organisasi internasional tidak hanya bekerja di level kebijakan besar, tetapi juga meresap ke dalam praktik teknis dan cara kerja sehari-hari birokrasi. Di sinilah letak relevansi mata kuliah Organisasi Internasional bagi seorang mahasiswa yang ingin memahami bagaimana kebijakan publik dirumuskan di dunia yang semakin terhubung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, M., Pritchett, L., & Woolcock, M. (2017). *Building state capability: Evidence, analysis, action*. Oxford University Press.
- Bappenas & UNDP Indonesia. (2020). Metadata indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals (SDGs)* Indonesia. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2023). Rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020–2024: Capaian paruh waktu. Kementerian PPN/Bappenas.
- Fukuda-Parr, S., & McNeill, D. (2019). *Knowledge and politics in setting and measuring the SDGs: Introduction to special issue*. *Global Policy*, 10(S1), 5–15.

- OECD. (2022). *OECD accession roadmap for Indonesia*. OECD Publishing.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Prizzon, A., Humphrey, C., & Truelove, A. (2017). *An age of choice for external finance: Findings from country case studies*. Overseas Development Institute (ODI) Working Paper 498.
- Rany, A. P., Farhani, S. A., Nurina, V. R., & Pimada, L. M. (2020). Tantangan Indonesia dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui indonesia *green growth* program oleh bappenas. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, 20(1), 63-73.
- Sachs, J. D., Lafortune, G., Fuller, G., & Drumm, E. (2023). *Implementing the SDG stimulus*. Sustainable Development Report 2023. Dublin University Press.
- Stone, D. (2019). *Making global policy*. Cambridge University Press.
- UNDP Indonesia. (2022). *United Nations sustainable development cooperation framework Indonesia 2021–2025*. United Nations Country Team Indonesia.
- World Bank. (2023). *Indonesia economic quarterly: Investing in people*. World Bank Group.